

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Kabupaten Belu dengan Luas sebesar 1127,25 km² dengan urutan ke 16 terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (BPS:2023). Dengan luas wilayah sebesar itu pemerintah telah mengadakan berbagai aset dengan harga perolehan sebesar Rp. 1,138,879,972,517 untuk menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan aset yang menggunakan dana yang relative besar. Dalam hal ini salah satu pembangunan yang di bangun pemerintah untuk menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yakni bendungan.

Bendungan merupakan aset pemerintah dengan sumber daya penting karena sangat mempengaruhi sekaligus membantu kebutuhan masyarakat. Pada pengelolaan aset meliputi Perencanaan kebutuhan/Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan/pemeliharaan, Penilaian, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Ganti rugi dan Sanksi agar aset pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat secara optimal dan dipergunakan secara tepat.

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara memadai dan efisiensi. Pengelolaan aset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara optimal. Pada tahun 2023 tepatnya bulan januari, pembentukan Unit Pengelola Bendungan Timor bagian Timur (Kabupaten Belu) dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, terdapat beberapa kasus dan permasalahan yang diidentifikasi di Bendungan Haekrit, Bendungan Haliwen dan Bendungan Rotiklot.

Maka dari penjelasan di atas, penulis mau menganalisis dampak manajemen aset tanah dan bangunan pada bendungan di Kabupaten Belu.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mencakup :

1. Aspek yang paling dominan untuk pengelolaan manajemen aset tanah dan bangunan pada bendungan di Pemerintah Kabupaten Belu;
2. Dampak dari pengelolaan manajemen aset tanah dan bangunan;

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah, antara lain :

1. Aspek apa saja yang paling sering digunakan dalam pengelolaan manajemen aset tanah dan bangunan pada bendungan di Kabupaten Belu ?
2. Berdasarkan hasil penentuan aspek, Dampak apa saja yang terjadi pada pengamanan aset tanah dan bangunan bendungan ?

1.4. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Menentukan aspek – aspek yang digunakan dalam pengelolaan manajemen aset tanah dan bangunan pada bendungan di Kabupaten Belu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
2. Lokasi penelitian berada di perangkat daerah yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Belu.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah:

1. Menganalisis aspek apa saja yang paling sering digunakan dalam pengelolaan manajemen aset tanah dan bangunan pada bendungan di Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi berdasarkan hasil penentuan aspek.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Belu agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam menentukan kebijakan pengelolaan aset.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai tambahan referensi, serta sumber penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan manajemen aset pemerintah daerah.